

## ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE, KABUPATEN ACEH UTARA DAN KABUPATEN BIREUEN

Fauzan<sup>1</sup>, Neni Triana<sup>2</sup> dan Reva Riski Silvana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

[fauzan@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:fauzan@stie-lhokseumawe.ac.id)<sup>1)</sup>, [nenitriana@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:nenitriana@stie-lhokseumawe.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[stie@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:stie@stie-lhokseumawe.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstract

*This study is intended to identify the characteristics of North Aceh District, Bireuen Regency and Lhokseumawe City as a mainstay area, namely areas that grow fast, have superior sectors, and have economic links with other regions. For this purpose an analytical tool is used: Klassen Typology, Location Quotient (LQ), Shift Share. The results showed that North Aceh District had a classification of high per capita income and low growth or advanced but depressed regions. With LQ analysis, in almost all sectors in Aceh Regency are the leading sectors except the provision of accommodation and drinking meals. However, the shift share analysis shows that sectors that truly have competitive advantage and specialization have only three sectors, namely the agricultural sector, the government administration sector, the corporate services sector and the service sector. With the classic typology model, it is illustrated that Bireuen District and Lhokseumawe City are two fast-growing but depressed regions, while North Aceh District is a fast-growing and fast-growing region besides that there is a strong link between the three Districts / Cities that can be developed as collaborative partners in area Development. From all the calculations that have been done, a conclusion can be drawn that the determination of North Aceh Regency as a reliable mainstay, however, when viewed from the many leading sectors and the existence of inter-regional economic linkages, North Aceh Regency is considered appropriate.*

**Keywords:** *Featured Sector, Gross Regional Domestic Product, Location Quotient, Shift Share, Klassen Typology*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini pada umumnya negara berkembang seperti di Indonesia masih memunculkan adanya dualisme yang mengakibatkan adanya gap atau kesenjangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, antar kota dan desa, atau pulau jawa dengan luar pulau jawa maupun antar dua kawasan pembangunan nasional yakni kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia. Selama ini tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bisa diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita.

Dalam hal ini pertumbuhan serta pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, namun mempunyai maksud yang sama. Badrudin (2012) menyatakan pertumbuhan serta pembangunan merupakan suatu proses dari pemerintah maupun swasta dalam mengelola sumberdaya serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Masalah pokok pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terletak pada penekanan kebijakan -kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan wilayah masing-masing dengan menggunakan

potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini menggunakan inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Todaro (2010) menyatakan tinggi rendahnya tingkat kemajuan pembangunan di suatu negara biasanya hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan baik secara keseluruhan maupun perkapita, yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lain, yang pada akhirnya hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah yang lain seperti soal kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, seringkali dikesampingkan.

Dari berbagai cara dan kasus yang terjadi, salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah, perlu adanya suatu wilayah andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing. Dalam Pujiati (2009) wilayah andalan merupakan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria sebagai wilayah yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi atau Kabupaten/Kota, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.

Kawasan andalan, menurut PP No.47 Tahun 1997 pasal 7 tentang RTRWN, merupakan kawasan-kawasan yang dipilih dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (*hinterland*), melalui pembudidayaan sektor atau subsektor sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah, sehingga ada beberapa daerah yang ingin mandiri dalam mengelola potensi di daerahnya, (Mursidah, 2013). Sjafrizal (1997:27-38) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan.

Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Ida 2005).

Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota, yang di antaranya termasuk Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan kabupaten Bireuen. Kota Lhokseumawe dan kabupaten Bireuen merupakan daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah daerah penyumbang utama kekayaan alam bagi pemerintah pusat dan Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Sedangkan Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen.

Menurut Boediono dalam Tarigan (2005) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe, sebenarnya mampu memperoleh PDRB yang lebih besar dan lebih meningkatkan pertumbuhannya jika mampu memanfaatkan

potensi-potensi daerah yang dimiliki kawasan tersebut. Mengingat Kota Lhokseumawe walaupun dengan wilayah yang kecil namun memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, dengan demikian memiliki juga kemampuan untuk mengelola dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan daerah tersebut. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran ada baiknya kita mendalami tentang kondisi setiap daerah dan mendapatkan informasi data yang tepat sehingga dapat berguna dalam penyusunan rencana pembangunan mendatang.

Alasan sosial yang mendasari keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah pun dapat dilihat jelas. Masyarakat merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat karena Kabupaten Aceh Utara terlalu luas sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengontrol secara rinci, terutama dalam hal pembangunan. Kehadiran aparatur pemerintah daerah yang secara fisik dan psikologis lebih dekat dengan rakyatnya untuk memahami permasalahan mereka sangat diperlukan. Selain itu ada juga yang memakai dasar mereka ingin melepaskan diri dari ikatan administrasi wilayah di atasnya, karena masalah jauhnya pusat pemerintahan dari tempat tinggal mereka seperti penduduk Bireuen harus ke Kota Lhokseumawe. Banyak daerah yang memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya kurang sejahtera, karena mendapatkan perlakuan tidak adil dari pusat pemerintahan daerahnya, sehingga terjadi kesenjangan. Sementara di lain pihak, terdapat beberapa kasus pemekaran wilayah justru membuat senang pemerintahan pusat daerah sebelumnya, karena beban pembangunan yang harus mereka tanggung berkurang.

Permasalahan selanjutnya yang melanda kawasan ini berhubungan dengan potensi ekonomi yaitu belum diketahui daerah masing-masing kabupaten/kota yang digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan. Setelah pemekaran dengan adanya otonomi daerah, kabupaten/kota pecahan Aceh Utara berjalan sendiri-sendiri membangun daerahnya. Sehingga tingkat provinsi harus mengetahui daerah mana yang bisa dijadikan contoh untuk mengacu pengembangan pembangunan di wilayah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode pengamatan tahun 2010-2017 (*Time series*). Data-data ini diperoleh dari berbagai penerbitan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh serta dari kantor atau dinas yang terkait dengan penelitian ini. Data-data ini meliputi PDRB Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen dari tahun 2010-2017 atas dasar harga konstan.

Menurut Tarigan (2009:82) *Location Quotient* adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri secara nasional. Dalam menjawab permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka digunakan beberapa metode analisis data, sebagai berikut:

### **1. Analisis *Location Quotient* (LQ)**

Teknik analisis LQ digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor yang berpotensi atau sektor unggulan atau sektor bukan unggulan. Analisis ini merupakan usaha untuk mengukur konsentrasi dari satu kegiatan ekonomi dalam satu daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah itu dengan perannya kegiatan ekonomi yang sejenis dalam perekonomian regional atau nasional.

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu perbandingan tentang besarnya suatu sektor di daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Perkembangan LQ ini dapat dilihat untuk suatu sektor tertentu dalam kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini dapat membantu untuk melihat kekuatan atau kelemahan pada suatu wilayah yang dibandingkan secara relatif dengan wilayah yang lebih luas. Potensi yang positif ini digunakan dalam strategi

pengembangan wilayah, dan faktor yang membuat potensi sektor di suatu wilayah yang lemah (Tarigan, 2008).

## 2. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah studi dengan wilayah nasional. Akan tetapi metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode *shift share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai faktor di suatu daerah dalam kaitannya dengan ekonomi nasional (Tarigan, 2004).

Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan yang dilakukan. Bila penyimpangannya positif, maka suatu sektor dalam daerah memiliki keunggulan kompetitif.

Menurut Hari (2013:14) Pertumbuhan PDRB total dapat dibagi menjadi komponen *shift* dan komponen *share*, yaitu:

- a. Komponen *Provincial Share* adalah banyaknya pertambahan PDRB Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh selama periode studi.
- b. Komponen *Proportional Shift*, melihat seberapa besarnya *net shift* Kota Lhokseumawe yang disebabkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB Kota Lhokseumawe yang berubah. Apabila  $P > 0$ , berarti Kota Lhokseumawe berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi Aceh tumbuh relatif cepat dan apabila  $P < 0$ , artinya Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Provinsi Aceh pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun.
- c. Komponen *Differential Shift*, mengukur seberapa besarnya *net shift* yang disebabkan oleh sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional *int*, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *Differential Shift Component* positif ( $D > 0$ ), sebaliknya apabila secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai *Differential Shift Component* yang negatif ( $D < 0$ ).

## 3. Analisis *Klassen Typology*

*Klassen Typology* merupakan alat analisis atau metode yang digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan di masing-masing sektor ekonomi. Hasil dari analisis *klassen typology* ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek laju pertumbuhan ekonomi daerah pada masa kedepan yang tentunya dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam penentuan kebijakan.

Tipologi *Klassen* dengan pendekatan sektoral menghasilkan 4 klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

1. Daerah maju dan cepat tumbuh

Daerah ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari wilayah referensi.

2. Daerah maju tapi tertekan  
Adalah daerah yang mempunyai pendapatan perkapita yang lebih tinggi, namun tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari wilayah referensi.
3. Daerah berkembang cepat  
Adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, namun tingkat perkapita sektor tersebut lebih rendah dari wilayah referensi.
4. Daerah relatif tertinggal  
Adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tergolong rendah dari wilayah referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Analisis *Location Quotient*

Hasil analisis *Location Quotient* menyatakan bahwa untuk tiga Kabupaten/Kota yang diteliti Kabupaten Aceh Utara merupakan Kabupaten yang memiliki sub sektor unggulan dan potensial yang terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe. Sub sektor tersebut adalah:

1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil  
Hal tersebut sangat wajar karena wilayah Kabupaten Aceh Utara yang luas di Provinsi Aceh menjadi tempat yang strategis perlintasan antar daerah sehingga banyak perusahaan atau pengusaha yang tertarik untuk menjadikan tempat bahkan pusat perdagangan barang/jasa.
2. Pertambangan dan Penggalian  
Dengan luas wilayah yang terbesar di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara memiliki banyak pertambangan seperti sumur gas yang dikelola oleh PT. Exxon Mobil serta dengan banyaknya sungai menciptakan banyak galian untuk pasir dan kerikil yang dipasarkan sampai luar wilayah Aceh.
3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  
Dengan banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara rumah sakit umum dan swasta banyak yang beroperasi dan menghasilkan kontribusi yang positif untuk PDRB Aceh Utara. Selain itu banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pusat bahkan pihak swasta baik dalam bentuk sosial, ekonomi dan politik.

Untuk Kota Lhokseumawe yang menjadi sektor unggulan dan potensial yang terbesar adalah penyediaan akomodasi, makan dan minum. Hal ini dikarenakan posisi strategis bagi para pengusaha makan atau minum untuk dijadikan tempat pusat gudang atau kantor dalam mendistribusikan barang/jasa yang mereka pasarkan di Provinsi Aceh. Untuk sektor lainnya rata-rata nilai LQ menunjukkan bahwa sama dengan Provinsi Aceh. Sedangkan untuk Kabupaten Bireuen yang menjadi sektor potensial adalah perdagangan besar dan eceran dimana karena memiliki potensi yang hampir sama dengan kota lhokseumawe, namun di Kabupaten Bireuen lebih banyak pabrik pengolahan makanan dan minuman. Untuk sektor lainnya banyak sektor yang belum dikatakan unggul dan potensial karena rata-rata LQ di bawah 1.

### 2. Hasil Analisis *Shift Share*

Sektor ekonomi yang terdapat di Aceh Utara mempunyai nilai D bernilai positif dengan nilai terbesar adalah yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial, sektor Jasa Lainnya, dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan demikian pertumbuhan setiap sektor ekonomi Kabupaten Aceh Utara tersebut berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Aceh.

Sektor ekonomi yang terdapat di Kota Lhokseumawe yang mempunyai nilai D positif dengan nilai terbesar yaitu Pertambangan dan Penggalian. Dengan demikian pertumbuhan sektor tersebut berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Aceh. Sektor ekonomi yang terdapat di Kota Lhokseumawe yang mempunyai nilai D bernilai negatif adalah sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan dan semua sektor kecuali sektor Pertambangan dan Pengendalian.

Sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Bireuen yang mempunyai nilai D positif dengan nilai terbesar Pengadaan Listrik dan Gas, Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi. Dengan demikian pertumbuhan sektor tersebut berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Aceh. Sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Bireuen yang mempunyai nilai D bernilai negatif adalah sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, serta Transportasi dan Pergudangan.

### 3. Hasil Analisis Tipologi Klassen

Dari hasil analisis Tipologi Klassen Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Tiga daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, masing-masing Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan Kabupaten Bireuen masuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertinggal, dari keempat klasifikasi tersebut di atas tidak ada satupun kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah relatif tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Aceh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari hasil analisis indeks LQ (*Location Quotient*) Aceh Utara yang merupakan sektor basis adalah sektor Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda. Untuk daerah Kabupaten Bireuen yang merupakan sektor basis adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sedangkan untuk Kota Lhokseumawe sektor basisnya adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas.
2. Hasil analisis shift share menunjukkan sektor yang tumbuh cepat di provinsi Aceh untuk Kabupaten Aceh Utara adalah Sektor pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Jasa, sedangkan sektor yang kompetitif adalah Pertambangan dan Penggalian dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda. Untuk Kabupaten Bireuen sektor yang tumbuh cepat adalah sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Jasa Perusahaan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Konstruksi. Sektor yang negatif adalah Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, serta Transportasi dan Pergudangan. Selanjutnya untuk Kota Lhokseumawe sektor yang tumbuh cepat adalah Transportasi dan Pergudangan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan, sedangkan yang negatif adalah sektor Konstruksi dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah.
3. Hasil analisis kontribusi sektor, sektor yang mempunyai kontribusi rata-rata yang lebih besar dibanding provinsi adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan ceran dan sektor pertambangan dan penggalian.

4. Berdasarkan hasil analisis tipologi klasen yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, masing-masing Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan Kabupaten Bireun masuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertinggal, dari keempat klasifikasi tersebut di atas tidak ada satupun kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah relatif tertinggal.

#### REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hari adi, 2013. *Analisis Pengaruh PMDN & PMA Terhadap PDRB di Kabupaten Siak* . Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Hilda, Nadia. 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jembrana Periode 2010-2015*, Skripsi UMS.
- Hoover, E.M., 1984. “*An Introduction to Regional Economics*. 2nd ed., New York Knof 1975, 3rd edition.
- Jamzani Sodik dan Nia Septia Ardyani (2005) “*Analisis Potensi Pengembangan Wilayah Di Eks Karesidenan Banyumas*”. *Regional Economic Impact*, AIP Journal.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Cetakan Kedua. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Meier, M.G. 1995. *Leading Issues in Economics Development*, Sixth Edition, Mc. Graw Hill, International Edition Finance Series. Singapore.
- Mursidah.dkk. 2013. *Analisis Pengembangan Kawasan Andalan di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi. No.1,Vol.1
- Nadia, HM, 2015. *Analisis Penentu Sektor Unggulan Pembangunan Daerah dan Strategi Pengembangannya*. Universitas Samratulangi Manado.
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah : Perpektif Ekonomi, social, dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Prasetyo, Y., Sukmono, A. 2016. *Analisis Perbandingan Nilai NDVI Landsat 7 dan Landsat 8 pada Kelas Tutupan Tajuk di Kota Semarang*. Jurnal Online. Diakses pada 10 Maret 2017.
- Retno, SP. 2015. *Analisis dan Strategi Pengembangan Ekonomi Di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014*. Universitas Semarang.

- Setyo, Retno (2015). “*Strategi Pengembangan Ekonomi Di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014*”. Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.
- Syamsul, 2013, *Analisis Kausalitas antara Tingkat Employment dengan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 1979-2004*, Skripsi UMS.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional-Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, 2010. “*Pembangunan Ekonomi*” Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2006. “*Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*”. Alih Bahasa: Amminudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wa Ode Zusnita. 2014. *Analisis Kawasan Andalan di Gunung Kidul. Pekbis Jurnal Vol.6, No.1. Hal: 6*. Bandung: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Padjadjaran.